



Analisis Strategi Program Pembangunan Dalam Pengentasan Kemiskinan Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Pematang Serai Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat

Subhan Azra¹, Yaumul Khair Afif²

^{1, 2}, STAI Jam'iyah Mahmudiyah, Langkat, Indonesia

E-mail : subhanazra2018@gmail.com

Abstract :

Villages have the authority to regulate resources and direction of development according to the resources they have in order to alleviate poverty that occurs in the village, therefore each village must have its own strategy. This research aims to find out about development program strategies in Pematang Serai Village, Tanjung Pura District, Langkat Regency, then review it from an Islamic economic perspective. The type of research carried out is descriptive qualitative research. Data sources were obtained from government officials and the community of Pematang Serai Village. Data collection was carried out by means of observation, interviews and documentation. Data processing and analysis techniques include editing, classification, verification, analysis and conclusion stages. The results of this research explain that the development program strategy in Pematang Serai Village, Tanjung Pura District, Langkat Regency consists of socialization, program deliberations, implementation of activities and training, these activities ran well and smoothly even though there were several obstacles that occurred. Poverty alleviation in Pematang Serai Village, Tanjung Pura District, Langkat Regency is by empowering the community in every development activity, facilities and infrastructure as well as economic development through facilities and infrastructure development activities as well as creativity training. Development in Pematang Serai, Tanjung Pura subdistrict, Langkat Regency has had a positive impact because it provides benefits to the local community from both economic and social aspects and is in line with Islamic Economics.

Keywords: *Village Development, Poverty Alleviation, Islamic Economy.*

Abstrak

Desa mempunyai wewenang untuk mengatur sumber daya dan arah pembangunan sesuai dengan sumber daya yang dimiliki guna mengentaskan kemiskinan yang terjadi di Desa tersebut, oleh karena itu setiap Desa harus memiliki strategi tersendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui yaitu tentang strategi program pembangunan di Desa Pematang Serai kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat lalu selanjutnya ditinjau menurut perspektif ekonomi Islam. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Sumber data diperoleh dari aparaturnya pemerintahan dan masyarakat Desa Pematang Serai. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengolahan dan analisis data yaitu tahap edit, klasifikasi, verifikasi, analisa dan kesimpulan. Hasil penelitian ini menjelaskan strategi program pembangunan di Desa Pematang Serai Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat terdiri dari sosialisasi, musyawarah program, pelaksanaan kegiatan dan pelatihan, kegiatan tersebut berjalan dengan baik dan lancar meskipun ada beberapa kendala-kendala yang terjadi. Pengentasan kemiskinan di Desa Pematang Serai Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat adalah dengan memberdayakan masyarakat dalam setiap kegiatan pembangunan, sarana dan prasarana maupun pembangunan perekonomian lewat kegiatan pembangunan sarana dan prasarana serta pelatihan-pelatihan kreativitas. Pembangunan di Pematang Serai kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat memberikan dampak yang positif

karena memberikan kemaslahatan bagi masyarakat setempat baik dari aspek ekonomi maupun aspek sosial serta sejalan dengan Ekonomi Islam.

Kata Kunci: Pembangunan Desa, Pengentasan Kemiskinan, Ekonomi Islam.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan sebuah negara yang mempunyai kekayaan terbanyak, namun memiliki persoalan kemiskinan dan pengangguran yang besar pula. Upaya menanggulangi kemiskinan dilakukan proses penguat penduduk miskin, yang mencakup lima aspek yaitu, pengembangan sumberdaya manusia, penyediaan modal kerja, penciptaan peluang dan kesempatan berusaha, pengembangan kelembagaan penduduk miskin, dan penciptaan sistem pelayanan kepada penduduk miskin yang sederhana dan efisien. Hal tersebut diharapkan dapat menanggulangi kemiskinannya serta meningkatkan kesejahteraannya (Maulida, 2019).

Permasalahan utama dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia saat ini terkait dengan adanya fakta bahwa pertumbuhan ekonomi tidak tersebar secara merata di seluruh wilayah Indonesia, ini dibuktikan dengan tingginya disparitas pendapatan antar daerah. Kemiskinan juga merupakan sebuah hubungan sebab akibat (kausalitas melingkar) artinya tingkat kemiskinan yang tinggi terjadi karena rendahnya pendapatan perkapita, pendapatan perkapita yang rendah terjadi karena investasi perkapita yang juga rendah (Tarigan, 2020).

Dalam pandangan Islam kemiskinan dianggap sebagai gangguan terwujudnya kesejahteraan sosial, atau paling tidak mempersulit realisasi kesejahteraan, karena wawasan ekonomi Islam lebih banyak memandang potensi alam yang dianugerahkan oleh Allah dari segi kecukupannya (*adequacy*) dari pada segi kekurangan atau kelangkaannya (Sarkawi et al., 2017). Oleh karena itu jika kelangkaan itu muncul, maka akibat kesalahan orang dalam memanfaatkannya, melestarikan atau karena kebodohan dan kemalasannya. Kemiskinan dipandang oleh Islam sebagai patologi sosial yang harus ditanggulangi (Sage, 2019).

Islam memandang suatu keberdayaan atas masyarakat suatu hal yang penting sehingga pemberdayaan dalam pandangan Islam telah memiliki paradigma yang holistik dan strategis (Nur, 2022). Pemberdayaan dalam konteks pembangunan masyarakat Islam merupakan sebuah pembelajaran kepada masyarakat agar dapat mandiri melakukan upaya perbaikan kualitas hidup yang menyangkut tentang kesejahteraan dan keselamatan dunia dan akhirat. Salah satu pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam Islam perlunya diterapkan adalah karena dengan adanya pemberdayaan akan menghasilkan pembangunan yang berkelanjutan (Pramestuty & Suryaningsih, 2022). Dengan hal seperti ini maka akan terus memperbaiki taraf hidup masyarakat serta dapat mengurangi kemiskinan.

Kebahagiaan merupakan tujuan utama kehidupan manusia (Harahap, 2023). Manusia akan memperoleh kebahagiaan ketika seluruh kebutuhan dan keinginannya terpenuhi, baik dalam aspek material maupun spiritual, dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Terpenuhinya kebutuhan yang bersifat material, seperti sandang, rumah, dan kekayaan lainnya, dan sekarang ini banyak mendapatkan perhatian dalam ilmu ekonomi. Terpenuhinya kebutuhan material inilah yang disebut dengan kesejahteraan. Dalam upaya mewujudkan kesejahteraan manusia menghadapi kendala pokok yaitu, kurangnya sumber daya yang bisa digunakan untuk mewujudkan kesejahteraan tersebut.

Isu-isu kemiskinan pun senantiasa cocok diselesaikan akar masalahnya melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat (Yuniarti et al., 2020). Oleh karena itu, banyak program

pemerintah yang dikhususkan kepada masyarakat pedesaan seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) maupun program-program lain sebagai program penanggulangan kemiskinan di pedesaan lebih mengutamakan pada skill atau kemampuan masyarakat. BUMDES sendiri merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian permodalannya berasal dari desa (Alam et al., 2019). Modal yang disisihkan nantinya bisa dimanfaatkan untuk menciptakan lapangan pekerjaan ataupun meningkatkan pelayanan masyarakat yang baik.

Saat ini desa menjadi perhatian bagi pemerintah pusat maupun daerah untuk meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Akan tetapi masih adanya baik daerah kabupaten maupun kota yang masih mempunyai desa tertinggal. Pembangunan dan pemberdayaan Desa masih perlu di perhatikan (Jati, 2013). Berdasarkan fenomena yang beredar yaitu setiap desa mempunyai pembagian dana untuk menunjang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Setiap desa mempunyai bagiannya masing-masing dengan jumlah yang di bagikan sesuai dengan prosedur yang ada. Fenomena yang sangat menggiurkan saat ini yaitu dana untuk mendanai penyelenggaraan desa begitu besar sehingga begitu banyak yang menginginkan untuk terwujudnya desa yang mandiri dengan membangun desa guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dalam segala aspeknya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki UU Nomor 6 Tahun 2014 memberikan mandat kepada pemerintah untuk mengalokasikan Dana Desa.

Permasalahan utama dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia saat ini terkait dengan adanya fakta bahwa pertumbuhan ekonomi tidak tersebar secara merata di seluruh wilayah Indonesia, ini dibuktikan dengan tingginya disparitas pendapatan antar daerah. Selain itu kemiskinan juga merupakan sebuah hubungan sebab akibat (kausalitas melingkar) artinya tingkat kemiskinan yang tinggi terjadi karena rendahnya pendapatan perkapita, pendapatan perkapita yang rendah terjadi karena investasi perkapita yang juga rendah (Fazaryani Irma Febby & Juanda Reza, 2022).

Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pengembangan wilayah pedesaan adalah adanya anggaran pembangunan secara khusus yang dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membangun wilayah pedesaan, yakni dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD). Inilah yang kemudian melahirkan suatu proses baru tentang desentralisasi Desa diawali dengan digulirnya Alokasi Dana Desa (ADD). Alokasi Dana Desa (ADD) ini dimaksudkan agar Desa dapat mandiri dan menciptakan lapangan pekerjaan baru di wilayah tersebut. Sejalan dengan hal tersebut Alokasi Dana Desa (ADD) juga dimaksudkan agar pemerintah Desa dapat mandiri dan berdiri sendiri tanpa mengharapkan bantuan dari pemerintah pusat serta dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru dan meningkatkan taraf hidup masyarakat di Desa tersebut (Zakiyah, Fuadi, 2022).

Desa diharapkan menjadi mandiri secara sosial, budaya, ekonomi, bahkan politik. Kini Desa memasuki era *self governing community* dimana Desa memiliki otonomi dan kewenangan dalam perencanaan, pelayanan publik, dan keuangan, maka desa perlu adanya sebuah lembaga yang bisa membantu pemerintah desa dalam mengembangkan usaha-usaha yang dianggap potensial dan produktif untuk kesejahteraan rakyat. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 yang diubah melalui PP Nomor 47 Tahun 2015 telah menyebutkan jika kini desa mempunyai wewenang untuk mengatur sumber daya dan arah pembangunan sesuai dengan sumber daya yang dimiliki (Andjioe et al., 2019).

Masalah ekonomi tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Ia berkaitan dengan berbagai macam kebutuhan, seperti kebutuhan pangan, sandang dan papan, serta kebutuhan

lainnya. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, sudah seharusnya manusia bekerja dengan mengolah segala yang telah disediakan di alam semesta ini, dan dari hasil kebutuhan tersebut kebutuhan manusia dapat terpenuhi, baik kebutuhan primer, sekunder, dan tersier.

Dalam perwujudan kesejahteraan ini setiap daerah di Indonesia memiliki perbedaan potensi, kebutuhan daerah dan sumber daya serta beban fungsi antar tingkat pemerintahan. Kondisi ini menimbulkan kemampuan ekonomi yang berbeda antar daerah. Oleh karena itu, untuk mengatasi ketimpangan ekonomi ini diperlukan suatu pengaturan secara adil mengenai hubungan keuangan, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan antar pemerintah daerah. Pemerintah pusat mengalokasikan dana perimbangan yang bersumber dari APBN untuk membantu pemerintah daerah mendanai segala kebutuhan dalam pelaksanaan desentralisasi.

Tujuan diadakan program tersebut adalah untuk memberi keterampilan, dan kerajinan dalam membentuk perekonomian perdesaan sehingga pemerataan ekonomi dapat dirasakan oleh semua kalangan. Salah satu desa yang perekonomiannya relatif belum berkembang adalah Desa Pematang Serai Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat. Di daerah ini masih sulit pembangunan sarana dan prasarana pembangunan Desa. Di Desa Pematang Serai perekonomiannya masih taraf rendah dalam penghasilan penduduknya, rata-rata pekerjaan masyarakatnya adalah penarik becak, bertani, nelayan, beternak, dan ada juga yang menjadi buruh. Akibat dari tertinggalnya perekonomian perdesaan maka pemerintah mengadakan pelatihan, dengan tujuan membentuk karakter setiap pemuda dalam membangun perekonomian desa.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Sedangkan pendekatan penelitian yang diambil dalam penelitian ini adalah pendekatan empiris (empirical approach). Pendekatan empiris adalah usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Pematang Serai Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Subjek pada penelitian ini adalah masyarakat setempat dan aparatur pemerintah Desa Pematang Serai Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat. Objek penelitian adalah strategi program pembangunan desa Pematang Serai Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat dalam mengentaskan kemiskinan. Data primer diperoleh melalui hasil wawancara dengan para responden yaitu masyarakat setempat dan aparatur pemerintah Desa Pematang Serai Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat. Data penelitian dikumpulkan dengan tehnik observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya data dianalisis dan di buat kesimpulan hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Strategi Program Pembangunan Di Desa Pematang Serai Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat

Dalam membangun sebuah daerah termasuk desa tidak bisa dilakukan serta merta, rangkaian perencanaan pembangunan daerah dalam setiap tahun anggaran pelaksanaan dalam mekanisme sebagai berikut:

1. Di tingkat masyarakat dilakukan identifikasi dan perumusan masalah dan kebutuhan, analisis potensi, penentuan prioritas, dan penyepakatan program swadaya, melalui forum warga RT/RW/dusun.
2. Di tingkat desa dilakukan pembahasan dan penyepakatan daftar prioritas usulan masyarakat yang akan di biayai APBDesa atau APBD melalui forum Musbangdes.
3. Di tingkat kecamatan dilakukan pembahasan dan penyepakatan daftar prioritas usulan masyarakat yang telah disepakati dalam musyawarah desa dan akan dibiayai APBD melalui forum Musrenbang.
4. Di prioritas usulan kecamatan yang akan dibiayai APBD melalui forum Rakorbang.

Jadi pembangunan sebuah daerah dasarnya berasal dari desa, oleh karena itu perencanaan pembangunan desa sangat mempengaruhi hasil yang akan terealisasi. Perencanaan pembangunan desa merupakan suatu model penggalian potensi dan gagasan pembangunan desa yang menitikberatkan pada peran masyarakat dalam keseluruhan proses pembangunan. Partisipasi aktif masyarakat dalam segala bentuk kegiatan pembangunan diwilayahnya masing-masing sangatlah diperlukan, hal ini dikarenakan agar dari setiap program yang dilaksanakan, memang benar-benar menjadi kebutuhan masyarakat, dan sikap masyarakat setempat, serta menuntut masyarakat agar lebih memiliki rasa tanggung jawab, terutama terhadap program yang mereka inginkan sendiri.

Dari teori tersebut menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan desa dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat yang menjadi wujud nyata peran masyarakat dalam membangun masa depan desa. Peran masyarakat dalam hal ini adalah analisa mengenai apa saja kebutuhan yang harus terpenuhi, serta menuntut masyarakat agar lebih memiliki rasa tanggung jawab.

Dalam wawancara dengan Bapak Sugimin selaku Kepala Desa Pematang Serai Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat mengatakan bahwa: “Keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan atau pembangunan cukup baik. Hal ini terlihat dari awal proses perencanaannya sampai pelaksanaannya, seperti ketika misalkan pemerintah desa mengadakan musyawarah dusun, masyarakat hadir dengan mengeluarkan pendapat dan idenya, terus ketika pelaksanaan atau realisasi terhadap kebutuhan, mereka hadir ikut serta dalam proses pelaksanaan pembangunan, pembangunan jalan dan pembangunan madrasah diniyah misalkan, masyarakat hadir dan ikut serta dalam kegiatan”.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Bapak Sugimin pemberdayaan yang berlangsung di Pematang Serai. Tujuan dari pemberdayaan dalam meningkatkan kemandirian masyarakat mulai mengena pada masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan kemampuan masyarakat dalam menganalisis kebutuhan masyarakat sendiri untuk bersama disepakati dalam Musdus dan Musbangdes sehingga pembangunan dapat terlaksana dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.

Pemberdayaan masyarakat dapat dikatakan sebagai kerjasama dengan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Pemberdayaan semakin populer dalam konteks pembangunan dan pengentasan kemiskinan yang terjadi pada saat ini. konsep pemberdayaan yang diusung adalah untuk melihat yang tidak berdaya atau lemah (*powerless*).

Pelaksanaan program pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan yang lainnya di pedesaan, kerap kali kurang berjalan dengan baik, dan fenomena seperti ini berlangsung beberapa tahun kebelakang. Hal ini disebut-sebut diakibatkan karena terbatasnya anggaran yang terdapat di setiap pemerintahan desa, yang pada akibatnya program-program yang dilaksanakan di desa-desa tidak berjalan secara signifikan.

Selain itu, tidak sedikit desa di Indonesia yang dikategorikan tertinggal. Disaat wilayah perkotaan gencar akan program pembangunan dan penataan kotanya, wilayah pedesaan seakan-akan kurang mendapat perhatian, mungkin hampir disemua sektor. Kota dengan segala kemajuannya semakin terus maju, sedangkan desa seakan akan belum ada perkembangan.

Alasan-alasan seperti itulah yang pada akhirnya pemerintah pusat mulai mengucurkan dana untuk setiap desa di Indonesia, yang disebut dengan Dana Desa (DD). Dana yang dikucurkan tersebut dalam pelaksanaannya melihat pada keadaan desa itu sendiri, yang pada hal ini juga akan memengaruhi pada besaran dana yang akan diterima oleh desa tersebut. Misalnya melihat pada luas wilayah, jumlah penduduk, dan yang lainnya. Dana desa ini diperuntukkan salah satunya untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dengan adanya kebijakan seperti ini, maka sekarang adalah waktu yang tepat bagi setiap desa termasuk Pematang Serai untuk berbenah diri.

Sesuai dengan penjelasan diatas, kini program pembangunan di Pematang Serai mulai dilaksanakan. Perubahan-perubahan dalam berbagai lini mulai terlihat. Dalam pelaksanaan pembangunan khususnya, Pemerintah Pematang Serai sendiri menyesuaikan dengan apa yang menjadi keinginan masyarakat, dan yang menjadi kebutuhan bagi masyarakat Pematang Serai itu sendiri. Dalam hal ini pihak Pemerintah Pematang Serai melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan agenda kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan.

Pemerintah Pematang Serai terutama setelah adanya dana desa ini secara perlahan telah melaksanakan aktifitas dan perbaikan desa. Berbagai responpun muncul dari masyarakat, terutama terhadap aktifitas program-program yang dilakukan oleh Pemerintah Pematang Serai.

Berbagai upaya memang telah coba dilakukan oleh Pemerintah Pematang Serai guna meningkatkan kualitas desa agar menjadi lebih baik lagi, terutama dalam hal pembangunan. Selain itu, dalam pembangunan di Pematang Serai hanya baru sebatas pada ranah pembangunan fisik atau infrastruktur saja. Dan kedepannya dana desa ini diharapkan betul-betul digunakan untuk program-program pembangunan tidak hanya pembangunan fisik atau infrastruktur saja, serta tepat dana desa ini tepat guna, dan tepat sasaran.

Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten atau Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan dari dana desa pada dasarnya adalah mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan lebih pemeratakan pendapatan. Alokasi Dana Desa dimaksudkan untuk membiayai program pemerinah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Tujuan Alokasi Dana Desa adalah:

1. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
2. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan.
4. Meningkatkan pengamanan nilai-nilai keagamaan, sosial, budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.
5. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.
6. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.
7. Meningkatkan pedapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Namun dalam kenyataannya tidak selamanya program pembangunan desa dapat berjalan dengan lancar, terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat strategi program pembangunan desa, termasuk di Pematang Serai Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat. faktor-faktor tersebut akan sangat mempengaruhi keberhasilan dan realisasi program pembangunan desa yang diinginkan oleh masyarakat.

1. Faktor Pendorong

Beberapa faktor pendorong dalam pelaksanaan program pembangunan desa di Pematang Serai Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat adalah sebagai berikut:

a. Dukungan Kebijakan Dari Pemerintah Sekitar Pematang Serai

Pemerintah Kabupaten Langkat telah mengeluarkan peraturan yang berupa buku panduan untuk melaksanakan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Buku pedoman tersebut kini menjadi acuan Pemerintah Pematang Serai di dalam melaksanakan Alokasi Dana Desa (ADD). Dengan adanya peraturan tersebut, maka menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Langkat peduli terhadap pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam wilayahnya.

b. Kualitas Sumber Daya Manusia

Aparat Pemerintah Pematang Serai memiliki cukup pengetahuan di bidangnya masing-masing. Selain itu, mereka juga memiliki keterampilan yang baik untuk melaksanakan operasional kegiatan desa. Selain itu, aparat Pematang Serai juga memiliki loyalitas yang cukup tinggi terhadap tugas tugas yang diembannya.

c. Masyarakat ikut menyumbangkan idea atau pemikiran program pembangunan desa.

d. Masyarakat ikut bergotong royong dalam kegiatan program pembangunan desa yang ada di Pematang Serai.

2. Faktor Penghambat

Beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Pematang Serai Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat adalah sebagai berikut:

a. Jumlah Alokasi Dana Desa (ADD)

Sebagai penunjang operasional administrasi pemerintah masih terbatas berdasarkan pernyataan dari aparat desa yang menyatakan bahwa dana desa masih dianggap kurang juga tidak dapat diabaikan begitu saja. Mengingat bahwa dana desa merupakan aspek vital dalam pelaksanaan sebuah pembangunan desa. Maka, perlu adanya evaluasi ulang mengenai penyelenggaraan Alokasi Dana Desa (ADD) di Pematang Serai ini dengan tujuan agar berapapun dana yang diperoleh dapat dikelola dengan baik dan tepat sasaran.

b. Kurangnya Intensitas Sosialisasi Program Pembangunan Desa Pada Masyarakat

Berdasarkan pernyataan dari beberapa warga Pematang Serai yang mengungkapkan ketidak tahuan mereka tentang program pembangunan desa terlihat bahwa sosialisasi terhadap masyarakat mengenai program pembangunan desa masih sangat minim. Hal ini akan membuat pemahaman warga terhadap program pembangunan desa juga sangat kurang, tentunya akan berakibat pada sulitnya mengajak warga untuk berpartisipasi di dalam pelaksanaan program pembangunan desa maupun di dalam pengawasan selama masa pelaksanaannya.

Dengan kurangnya pemahaman warga akan program pembangunan desa maka warga juga akan sulit memahami tugasnya dalam turut berperan serta dalam pelaksanaan pengalokasian dana desa. Hal ini menyebabkan rendahnya pemberdayaan yang melibatkan masyarakat.

Berdasarkan hasil penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa strategi program pembangunan di Desa Pematang Serai Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat terdiri dari

sosialisasi, musyawarah program, pelaksanaan kegiatan dan pelatihan, kegiatan tersebut berjalan dengan baik dan lancar meskipun ada beberapa kendala-kendala yang terjadi.

B. Pengentasan Kemiskinan Di Desa Pematang Serai Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat

Beberapa strategi pembangunan desa dalam pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah Pematang Serai dalam meningkatkan kualitas desa sebagai berikut:

1. Perbaikan Akses Jalan, Jembatan Dan Lain-Lain

Pembangunan infrastruktur merupakan hal yang sangat vital dan penting untuk mempercepat proses pembangunan berskala Nasional. Tidak hanya itu, dengan berjalannya pembangunan infrastruktur, akan sangat menunjang bagi masyarakat dalam menjalankan segala aktifitasnya, serta dengan pembangunan infrastruktur ini akan berpengaruh pula dalam berbagai sektor.

Kondisi pembangunan di Pematang Serai saat ini memang belumlah berjalan secara pesat, hal ini salah satunya dapat dilihat dari perspektif pembangunan desa yang dapat dikatakan belumlah sepenuhnya memadai, salah satu contohnya yaitu pembangunan infrastruktur jalan desa. Sesuai dengan salah satu misi dari Pematang Serai yakni mengoptimalkan sarana dan prasarana desa, maka dalam proses optimalisasi ini diawali dengan pembangunan yang salah satunya adalah pembangunan infrastruktur.

Pemerintah Pematang Serai melakukan suatu proses perencanaan pembangunan desa yang bersumber dari Program Dana Desa (DD) dan Anggaran Dana Desa ADD. Pemerintah Pematang Serai dalam pemanfaatan dana desanya, secara umum memang diprioritaskan dalam upaya peningkatan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa yang digunakan oleh Pemerintah Pematang Serai dalam rangkan untuk memberdayakan masyarakat desa, lebih diarahkan pada perbaikan atau pembangunan sarana dan prasarana fisik desa, yang meliputi perbaikan atau pembangunan sarana publik dalam skala kecil seperti jalan desa, dan perbaikan jalan ke tempat pemakaman umum.

Dalam pelaksanaan pembangunan desa pada tahun 2023, Pemerintah Pematang Serai telah melaksanakan beberapa kegiatan, seperti pembangunan jembatan, dan pembangunan jalan di dusun-dusun. Dari hasil wawancara dengan Ibu Hardianti, dikatakan bahwa:

“Dengan adanya pembangunan jembatan dan jalan yang dilakukan Pemerintah Pematang Serai di dusun-dusun diharapkan dapat mempermudah jalannya perekonomian di Pematang Serai”.

Pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Pematang Serai, pastinya berdasarkan apa yang menjadi usulan dari setiap masyarakat, hal ini dimaksud agar pembangunan atau pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Pematang Serai benar-benar dapat terasa manfaatnya.

2. Pembangunan Pos Pelayanan Terpadu, Pembinaan dan Pengelolaan Posyandu

Posyandu merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar, utamanya untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.

Maka dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, Pemerintah Pematang Serai menyelenggarakan program pemberdayaan kesehatan masyarakat. Pembuatan Pos

Pelayanan Terpadu (POSYANDU) di kampung-kampung menjadi program pemberdayaan dalam bidang kesehatan.

Selain itu pengalokasian sarana kesehatan menjadi nilai tambah dalam program pemberdayaan kesehatan ini. Selain itu, pembangunan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di setiap desa, serta dibarengi dengan pemberdayaan para kader-kader Posyandu, Pemerintah Pematang Serai sendiri berharap masyarakat Desa Pematang Serai terutama para ibu hamil dan balita, mendapatkan layanan kesehatan yang maksimal, yang pada hakikatnya sangatlah penting mereka dapatkan terutama bagi para ibu hamil dan balita.

3. Menggiatkan Program PKK Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUB)

Tidak hanya itu, dari segi pemberdayaan ekonomi pun Pemerintah Pematang Serai mengupayakan peningkatan-peningkatan, yaitu dengan mengadakan Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang berasal dari program PKK dimana hal ini memiliki tujuan yang sangat positif dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, program dari KUB ini salah satunya adalah mengadakan pelatihan-pelatihan yaitu membuat batik, kuliner seperti bandeng cabut duri dll. Dalam pemberdayaan PKK inipemerintah Pematang Serai mengalokasikan dana yang berasal dari dana desa.

4. Menciptakan Program Kelompok Petani dan Nelayan

Pemerintah Desa Pematang Serai juga menciptakan beberapa kelompok petani dan nelayan yang bertujuan untuk meningkatkan hasil dari panen dari lading dan kebun yang dikelola serta meningkatkan hasil tangkapan saat melaut, salah satu programnya adalah memberi pelatihan yaitu cara membuat pupuk kandang serta memberikan fasilitas alat-alat pertanian bagi petani, sedangkan bagi nelayan diberikan alat tangkap ikan, jaring, dan mesin baru.

5. Mendirikan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa)

BUMDes sebagai badan usaha yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa. Pengembangan BUMDes merupakan bentuk penguatan terhadap lembaga lembaga ekonomi desa serta merupakan alat pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi yang ada di desa guna mencapai peningkatan kesejahteraan warganya.

Dalam wawancara dengan bapak Abdul Fatah selaku KAUR Pembangunan, untuk pembangunan desa terdapat rencana jenis usaha yang akan dikembangkan melalui BUMDes diantaranya: Program PAMSIMAS (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat)

Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) adalah salah satu program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia dengan dukungan Bank Dunia, program ini dilaksanakan di wilayah pedesaan dan pinggiran kota.

Program PAMSIMAS bertujuan untuk meningkatkan jumlah fasilitas pada warga masyarakat kurang terlayani termasuk masyarakat berpendapatan rendah di wilayah pedesaan dan peri-urban. Dengan PAMSIMAS, diharapkan mereka dapat mengakses pelayanan air minum dan sanitasi yang berkelanjutan serta meningkatkan penerapan perilaku hidup bersih dan sehat.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa pengentasan kemiskinan di Desa Pematang Serai Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat adalah dengan memberdayakan masyarakat dalam setiap kegiatan pembangunan, sarana dan prasarana maupun pembangunan perekonomian lewat kegiatan pembangunan sarana dan prasarana serta pelatihan-pelatihan kreativitas

C. Strategi Program Pembangunan Desa Pematang Serai Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat Dalam Pengentasan Kemiskinan Perspektif Ekonomi Islam

Perubahan yang terjadi pada diri manusia merupakan upaya yang ada dalam diri manusia tersebut untuk merubahnya sendiri. Manusia yang akan berubah dan berusaha akan dimudahkan Allah dalam segala urusannya. Melalui pemberdayaan masyarakat ini membukakan jalan bagi hambanya untuk dapat merubah keadaannya menjadi lebih baik lagi.

Berdasarkan ayat Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi:

...إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ... (١١)

Artinya: “Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”(QS. Ar-Ra'd: 11)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Tuhan tidak akan merubah keadaan mereka, selama mereka tidak merubah sebab-sebab kemunduran mereka. Sejalan dengan teori pemberdayaan masyarakat yang mana melalui pemberdayaan masyarakat dapat memiliki inisiatif dan kemampuan untuk mengelola sendiri sumber daya mereka. Sehingga dengan mereka dapat mengelola dan membentuk penggalian kemampuan pribadi, kreatifitas, kompetensi dan daya pikir dapat merubah kehidupannya pula dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki.

Adanya pembangunan infrastruktur dalam Islam memiliki dampak yang positif dan kemaslahatan dalam segi ekonomi maupun sosial. Pembangunan infrastruktur desa yang berdampak pada perekonomian masyarakat desa baik dalam segi melakukan pekerjaan dan berdagang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Dalam ekonomi Islam motif dalam aktifitas ekonomi adalah beribadah inilah yang kemudian mempengaruhi segala perilaku aktifitas dalam melakukan konsumsi, produksi, dan interaksi ekonomi lainnya.

Apabila masyarakat merasakan dampak dari pembangunan yang membuat perekonomian masyarakat menjadi meningkat, artinya pembangunan tersebut mengalami dampak yang positif serta menjadikan masyarakat sejahtera, dalam ekonomi Islam kesejahteraan merupakan adanya rasa aman baik dari segi perasaan, lingkungan, dan juga materi. Islam memandang kesejahteraan yang diperoleh masyarakat melalui peningkatan pendapatan merupakan balas jasa atas usaha yang dilakukan.

Berdasarkan teori diatas, pembangunan yang dilakukan pemerintah desa bersama masyarakat merupakan wujud keinginan masyarakat Pematang Serai untuk lebih maju dan berkembang. Partisipasi masyarakat meningkat dengan adanya program dana desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan menciptakan kemaslahatan umat, kemandirian dan kepribadian yang bertanggungjawab. Pemerintah Pematang Serai sangat terbantu dengan adanya dana desa dalam pembangunan sarana dan prasarana desa serta berjalannya program pemberdayaan masyarakat.

Dalam wawancara dengan Ibu Hardianti dikatakan bahwa: “Dengan adanya program pembangunan desa menggunakan dana desa dalam pengentasan kemiskinan, pemerintah desa mengajak dan merangkul seluruh lapisan masyarakat dalam pembangunan agar bisa ditingkatkan dari berbagai elemen, baik itu pemberdayaan kependudukannya, kesejahteraannya, perempuannya, dan sebagainya, alhamdulillah sedikit-sedikit kita tingkatkan. Contohnya adalah peningkatan sarana transportasi, peningkatan sarana kesehatan (puskesmas dan posyandu), peningkatan sarana keamanan (menghidupkan kembali siskamling), peningkatan sarana ibadah, mengadakan pelatihan-pelatihan (seperti membuat batik, menciptakan inovasi kuliner baru, dll) serta

memberikan penyuluhan dan mengoptimalkan kelompok petani tambak, nelayan dan peternakan”.

Dapat disimpulkan dari hasil wawancara diatas bahwa pemerintah Pematang Serai berupaya mempertanggungjawabkan apa yang menjadi amanah bagi pemerintahan desa yaitu mengelola dana desa dengan jujur dan amanah dengan merangkul semua pihak dalam pemberdayaan dan pembangunan. Pemberdayaan masyarakat menjadikan masyarakat mandiri, memiliki keterampilan serta kreatif dan berkompeten.

Dalam pembangunan sarana dan prasana desa dibangun bertujuan untuk memfasilitasi masyarakat dari aspek kesehatan, pendidikan, keamanan, serta perekonomian. Dalam Surat Al-Qashash ayat 77 yang menjelaskan:

وَأَتَّبِعْ فِي مَآءِثِكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
الْمُفْسِدِينَ (٧٧)

Artinya: “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”. (QS. Al-Qashash: 77)

Berdasarkan ayat tersebut kandungan yang sangat jelas bahwa kewajiban seorang muslim dan manusia untuk selalu berusaha sekuat tenaga dan fikiran untuk memperoleh harta dan mencari harta tersebut dengan bersungguh-sungguh sesuai dengan apa yang telah dianugerahkan oleh Allah SWT.

Manusia berkewajiban untuk berusaha dengan bersungguh-sungguh dalam menggunakan kemampuan yang dimilikinya dalam mencari, menggunakan dan memanfaatkan sumberdaya yang ada di muka bumi, karena dalam ayat Al-Qashash telah disebutkan Allah tidak merubah suatu kaum melainkan hambanya yang merubah. Artinya Allah telah membukakkan jalan untuk masyarakatnya dalam menggunakan potensi dan kemampuannya dalam pemberdayaan, tergantung kepada masyarakatnya dapat menggunakan program yang telah ada atau tidak.

Dalam ekonomi Islam terdapat beberapa azas, pondasi dan prinsip sebagai pilar ekonomi Islam. Prinsip merupakan pokok dasar seseorang untuk berfikir atau bertindak berdasarkan azas tertentu. Kaitan antara azas dengan ekonomi Islam adalah cara berfikir dan bertindak secara ekonomi dengan menggunakan nilai-nilai Islam. Pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa pada pembangunan desa seharusnya menerapkan beberapa prinsip ekonomi Islam, antarlain:

1. Prinsip Tauhid

Tauhid sebagai prinsip pertama dalam ekonomi Islam, prinsip tauhid harus dimiliki oleh manusia karena didalamnya terdapat aturan serta hukum dalam pembangunan dan perekonomian. Tauhid merupakan panduan bagi setiap orang Islam dalam melangkah sehingga aktivitas duniawi tidak hanya berorientasi untuk mencari materi saja, namun juga memiliki nilai tambah berupa kemenangan dan kebahagiaan (falah) diakhirat.

Berdasarkan teori diatas prinsip tauhid yang ditanamkan kepada masyarakat Pematang Serai yaitu ketika pembangunan sarana tempat ibadah dengan cara gotong royong untuk membangun madrasah diniyah dan masjid, masyarakat hadir ikut serta dalam kegiatan pembangunan dari awal proses perencanaan sampai akhir pelaksanaan.

2. Prinsip Nubuawah

Prinsip nubuwah mengajarkan kepada umat Islam untuk senantiasa meneladani sifat-sifat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW, sifat-sifat yang diturunkan Allah kepada Nabi yaitu sifat Shiddiq, Amanah, Tabligh dan Fathonah.

Dalam praktiknya pemerintah Pematang Serai berupaya mempertanggung jawabkan apa yang menjadi amanah bagi pemerintah desa yaitu mengelola dana desa dengan jujur dan amanah dengan merangkul semua pihak dalam pembangunan desa.

3. Prinsip Kepemilikan

Prinsip dasar kepemilikan menurut ekonomi Islam:

- a. Pemilik bukanlah penguasa mutlak atas sumber daya alam yang tersedia, tetapi pemilik dituntut untuk memanfaatkan sumber daya alam baik untuk dirinya maupun orang lain. Karena apa yang ada di bumi dan dilangit adalah kepemilikan Allah
- b. Batas kepemilikan manusia hanya pada saat manusia itu hidup didunia.
- c. Sumber daya yang menyangkut kepentingan umum dan menjadi hajat orang banyak tidak boleh dimiliki secara individu.

Berdasarkan prinsip dasar kepemilikan menurut ekonomi Islam, di dalam praktiknya pemerintah Pematang Serai memanfaatkan dan bukan menguasai secara mutlak dana desa melainkan digunakan secara bijak dan bertanggung jawab dalam upaya meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana agar masyarakat dapat menjadi lebih baik secara perekonomian dan kualitas hidup.

4. Prinsip Keseimbangan

Konsep keseimbangan yang tidak hanya mengukur kebaikan dari hasil usaha yang diarahkan untuk dunia dan akhirat saja, tetapi berkaitan juga tentang kepentingan (kebebasan) perorangan dengan kepentingan umum yang harus dipelihara antara keseimbangan antara hak dan kewajiban dan kewajiban yang harus terealisasikan.

Dalam wawancara dengan bapak Muhyiddin sebagai seorang tokoh agama berpendapat bahwa pemerintah Pematang Serai pada pengelolaan dana desa bersama masyarakat dan lembaga yang ada selalu bermusyawarah dalam menentukan arah pembangunan dan pemberdayaan melalui program dana desa.

Dapat disimpulkan dari hasil wawancara berdasar pada teori diatas menunjukkan bahwa konsep keseimbangan pada pengelolaan di Pematang Serai telah terealisasi dilihat dari pembangunan dan pemberdayaan yang dilakukan pemerintah Pematang Serai.

5. Prinsip Keadilan

Dari wawancara dengan bapak Muslih selaku masyarakat Pematang Serai mengatakan bahwa pemberdayaan yang dilaksanakan pemerintah desa berdasar dari kesepakatan bersama dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat, dari usulan-usulan yang diambil dari perwakilan setiap rt atau dusun yang berpartisipasi pada musyawarah desa.

Berdasarkan teori dan wawancara yang ada terkait keadilan dapat disimpulkan bahwa keadilan dalam pengelolaan dana desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai usulan dari perwakilan masyarakat desa. Tetapi pemberdayaan yang dilakukan masih kurang merata, masih terdapat warga yang pekerjaannya serabutan belum mendapatkan pelatihanpelatihan agar bisa mandiri.

6. Prinsip Maslahah dan Manfaat

Prinsip maslahah yaitu dengan melakukan segala aktivitas untuk hal-hal yang mengacu pada kepentingan bersama. Aktivitas yang dapat dilakukan untuk kemaslahatan bersama adalah

melakukan hal yang bermanfaat serta terhindar dari hal yang membawa kerusakan (mafsadah) bagi manusia.

Berdasarkan teori dan wawancara dengan bapak Abdul Fatah selaku KAUR Pembangunan Pematang Serai, dengan adanya pemberdayaan, pengadaan pelatihan-pelatihan dan pembukaan desa wisata yang ada di Pematang Serai diharapkan dapat menjaga kelestarian hutan mangrove dan pantai serta dapat membuka lapangan pekerjaan baru yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat desa.

7. Prinsip Persaudaraan (*Ukhuwah*) Dan Tolong-Menolong (*Ta'awun*)

Prinsip persaudaraan (*ukhuwah*) merupakan identitas sebagai sesama muslim adalah saudara. Sedangkan, dalam prinsip tolong-menolong (*ta'awun*) merupakan wujud kepedulian terhadap sesama muslim dalam meringkankan bebannya, sehingga dapat terwujud kegiatan ekonomi yang bermanfaat untuk semua pihak.

Dalam kerangka konsep persaudaraan ini, sikap yang baik kepada orang lain bukanlah sebagaimana yang diajarkan ekonomi kapitalisme. Sebuah perjuangan hidup tidak hanya untuk memenuhi kepentingan dan kepuasan individu semata, tetapi juga saling berkorban dan bekerjasama untuk memenuhi kebutuhan primer saudara seiman yang fakir ataupun miskin.

Persaudaraan dan saling tolong-menolong berarti pemberdayaan masyarakat memerlukan kebersamaan dan saling tolong-menolong dari mereka yang terlibat dalam pengembangan masyarakat lainnya. Melalui kebersamaan kompleksitas dari permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pemberdayaan masyarakat akan terasa ringan dan mudah untuk dilaksanakan.

Adapun contoh persaudaraan dan saling tolong-menolong dalam pemberdayaan di Pematang Serai yaitu dalam memberikan pelatihan-pelatihan dan pembentukan kelompok tani dan nelayan tidak melihat miskin dan kaya, semua dilatih sesuai dengan kemampuan dan bidangnya masing-masing meskipun pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah desa masih kurang merata.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa pembangunan di Pematang Serai kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat memberikan dampak yang positif karena memberikan kemaslahatan bagi masyarakat setempat baik dari aspek ekonomi maupun aspek sosial serta sejalan dengan Ekonomi Islam. Pembangunan sarana dan prasarana memberikan kemaslahatan karena masyarakat merasakan dampak terhadap perekonomian masyarakat. Sebagian masyarakat seperti petani, nelayan, pedagang, dan lainnya memang merasakan dampak positif dari pembangunan sarana dan prasarana karena mereka lebih mudah menggunakan akses jalan dan jembatan dalam melintasnya untuk bekerja. Sedangkan untuk masyarakat yang memiliki potensi dan kemampuan dalam bidangnya merasa diuntungkan karena mendapat pelatihan-pelatihan yang dapat membantu perekonomian mereka.

KESIMPULAN

Setelah melakukan penelitian dan dilakukannya pembahasan terhadap data yang diperoleh dalam penelitian, maka sebagai penutup penulis akan memberikan kesimpulan terhadap penelitian yang telah dilakukan. Dalam penelitian ini penulis menarik kesimpulan bahwa akibat program pembangunan desa dengan tujuan untuk mengentaskan kemiskinan desa.

Strategi program pembangunan di Desa Pematang Serai Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat terdiri dari sosialisasi, musyawarah program, pelaksanaan kegiatan dan

pelatihan, kegiatan tersebut berjalan dengan baik dan lancar meskipun ada beberapa kendala-kendala yang terjadi.

Pengentasan kemiskinan di Desa Pematang Serai Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat adalah dengan memberdayakan masyarakat dalam setiap kegiatan pembangunan, sarana dan prasarana maupun pembangunan perekonomian lewat kegiatan pembangunan sarana dan prasarana serta pelatihan-pelatihan kreativitas. Pembangunan di Pematang Serai kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat memberikan dampak yang positif karena memberikan kemaslahatan bagi masyarakat setempat baik dari aspek ekonomi maupun aspek sosial serta sejalan dengan Ekonomi Islam. Pembangunan sarana dan prasarana memberikan kemaslahatan karena masyarakat merasakan dampak terhadap perekonomian masyarakat. Sebagian masyarakat seperti petani, nelayan, pedagang, dan lainnya memang merasakan dampak positif dari pembangunan sarana dan prasarana karena mereka lebih mudah menggunakan akses jalan dan jembatan dalam melintasinya untuk bekerja. Sedangkan untuk masyarakat yang memiliki potensi dan kemampuan dalam bidangnya merasa diuntungkan karena mendapat pelatihan-pelatihan yang dapat membantu perekonomian mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, A. P., Harahap, M. A., Gunawam, F., Choiriyah, S., & Hasibuan, W. (2019). Sosialisasi Penguatan Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Padang Langkat. *Jurnal ABDIMASA Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 54–59. [file:///C:/Users/HP/Downloads/1518-Article Text-3398-1-10-20211009.pdf](file:///C:/Users/HP/Downloads/1518-Article%20Text-3398-1-10-20211009.pdf)
- Andjioe, O. R., Soraya, S., Riyani, Y., Mardiah, K., Khamim, K., & Rezano, T. (2019). Mewujudkan Kemandirian Dan Kewirausahaan Melalui Pelatihan Manajemen Keuangan UMKM. *DIKEMAS (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 3(2), 93–104. <https://doi.org/10.32486/jd.v3i2.459>
- Fazaryani Irma Febby & Juanda Reza. (2022). Pemerintah Terhadap Kemiskinan Di Sumatera Utara Pada Tahun 2006–2020. *Jurnal Ekonomika Indonesia Volume*, 11(2), 30–37. [https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.29103/ekonomika.v11i2.9854](https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.29103/ekonomika.v11i2.9854)
- Harahap, M. A. (2023). Measuring Muslim Welfare: A Falah-Based Index. *Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 12(2), 478–499. <https://doi.org/10.22373/share.v12i2.19191>
- Jati, W. R. (2013). Analisis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Lokal Berbasis Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Yogyakarta. *Sosiokonsepsia*, 18(3), 331–344.
- Maulida, L. S. (2019). Peran pengelola agrowisata dalam mengentaskan kemiskinan masyarakat pedesaan. *Jurnal Comm-Edu*, 2(1), 70–80. <https://doi.org/https://doi.org/10.22460/comm-edu.v2i1.2445>
- Nur, S. K. (2022). PERAN NILAI-NILAI MAQHASID SYARIAH DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI TENGAH PANDEMI COVID 19. *RIBHUNA: Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 1(2), 1–23. <http://ejournal.iaiiibrahimy.ac.id/index.php/ribhuna/article/view/1543>
- Pramestuty, D. K., & Suryaningsih, S. A. (2022). Pendayagunaan Zakat Untuk Pemberdayaan Pendidikan Melalui Program Genpres Pada Laz Nurul Hayat Gresik. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 5(1), 130–145.

<https://doi.org/10.26740/jekobi.v5n1.p130-145>

- Sage, D. (2019). Unemployment, wellbeing and the power of the work ethic: Implications for social policy. *Critical Social Policy*, 39(2), 205–228. <https://doi.org/10.1177/0261018318780910>
- Saidatun Zakiyah, Fuadi, A. (2022). Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mozaik Desa Pematang Serai Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat. *JEKSya Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1(2), 120–129. <https://jurnal.perima.or.id/index.php/JEKSya/article/view/105>
- Sarkawi, A. A., Abdullah, M. F., Abdullah, A., & Khazani, N. A. (2017). A Conceptual Framework of Maqasidic Human Wellbeing Index. *International Journal of Advanced Biotechnology and Research (IJBR)*, 8(3), 220–225.
- Tarigan, W. J. (2020). PENGARUH PENDAPATAN DOMESTIK REGIONAL BRUTO PERKAPITA DAN DOMESTIK SUMATERA UTARA Wico Jontarudi Tarigan. *EKUILNOMI: Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 2(2), 135–147. <https://doi.org/DOI:10.36985/ekuilnomi.v2i2.73>
- Yuniarti, P., Wianti, W., & Nurgaheni, N. E. (2020). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis Islam*, 2(3), 169–176. <https://doi.org/10.36407/serambi.v2i3.207>